

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peran dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Jambi dalam pengawasan masalah upah minimum di provinsi jambi, Untuk mengetahui menganalisis kendala peran dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi jambi dalam pengawasan masalah upah minimum di provinsi. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan masalahnya, yakni : Bagaimana Peran Disnakertrans Provinsi Jambi Dalam Pengawasan Masalah Upah Minimum Di Provinsi Jambi dan Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Disnakertrans Provinsi Jambi. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa Peran Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi dalam pengawsan masalah upah minimum sudah sesuai dengan dalam pergub nomor 56 tahun 2016, ini dibuktikan pada data Disnakertrans Provinsi Jambi hanya terdapat 28 kasus dari 1845 yang terdiri dari perusahaan. Yang berarti hanya 2% yang melakukan pelanggaran pengupahan, Kendala yang dihadapi oleh Disnakertrans Provinsi Jambi Kurangnya Jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan, kurangnya anggaran APBN atau APBD terkait pengawasan masalah upah minimum Provinsi yang menyebabkan pengawasan berjalan kurang maksimal. diperlukan evaluasi atas peraturan standar upah agar pemenuhan upah Minimum Provinsi di Provinsi Jambi terlaksana.

Kata kunci : *Peran, Pengawasan, Upah Minimum, Dinas Tenaga Kerja.dan Transmigrasi.*

ABSTRACT

This research is to find out and analyze the role of the Jambi province Manpower and Transmigration Service in supervising minimum wage issues in Jambi Province. To find out and analyze the obstacles to the role of the Jambi Province Manpower and Transmigration Service in supervising minimum wage issues in the province. Based on the research objectives, the problem can be formulated, namely: What is the role of the Jambi Province Manpower and Transmigration Department in monitoring minimum wage issues in Jambi Province and what are the obstacles faced by the Jambi Province Manpower and Transmigration Office. The method used is empirical juridical. The results of this research prove that the role of the Jambi Province Manpower and Transmigration Service in overseeing minimum wage issues is in accordance with Gubernatorial Regulation number 56 of 2016. This is proven by data from the Jambi Province Manpower and Transmigration Office, there are only 28 cases out of 1845 consisting of companies. Which means only 2% who commit wage violations, the obstacles faced by the Jambi Province Manpower and Transmigration Office are the lack of the number of labor inspection employees, the lack of APBN or APBD budgets related to supervision of the provincial minimum wage problem which causes supervision to run less than optimally. Evaluation of wage standard regulations is needed so that compliance with the Provincial Minimum Wage in Jambi Province is implemented.

Keywords: Role , Supervision, Minimum Wage, Department of Manpower and Transmigration..